

Peran Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kota Batu

Rizqy Dwi Premithasari

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

premithasari1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran dewan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota batu. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batu, Jawa Timur pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas informasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pendidikan Kota Batu memiliki peran strategis dalam membangun sistem pendidikan yang bermutu, antara lain melalui kegiatan pendampingan sekolah, pelatihan peningkatan kompetensi guru, serta penguatan peran komite sekolah dan pelibatan masyarakat. Dewan Pendidikan juga aktif dalam menyusun rekomendasi kebijakan berbasis kebutuhan lapangan dan melakukan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang berjalan. Implementasi prinsip-prinsip mutu Crosby terlihat dalam upaya Dewan Pendidikan mendorong kesesuaian antara proses pendidikan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, serta dalam menciptakan sistem yang mencegah terjadinya kesalahan pendidikan sejak awal. Secara keseluruhan, Dewan Pendidikan menjadi aktor penting dalam memperkuat kualitas dan akuntabilitas pendidikan di Kota Batu.

Kata Kunci: *Manajemen Mutu, Dewan Pendidikan, Pendidikan*

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the education council in improving the quality of education in Batu City. This study was conducted in Batu City, East Java in 2025. This study uses a descriptive qualitative method. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out using triangulation techniques to ensure the validity of information from various sources. The results of the study indicate that the Batu City Education Council has a strategic role in building a quality education system, including through school mentoring activities, teacher competency improvement training, and strengthening the role of the school committee and community involvement. The Education Council is also active in compiling policy recommendations based on field needs and evaluating ongoing education programs. The implementation of Crosby's quality principles can be seen in the Education Council's efforts to encourage alignment between the education process and the needs of students and the community, as well as in creating a system that prevents educational errors from the start. Overall, the Education Council is an important actor in strengthening the quality and accountability of education in Batu City.

Key Words: *Quality Management, Board of Education, Education*

1. PENDAHULUAN

Dewan Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Keberadaan Dewan Pendidikan menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pendidikan berperan memberikan berbagai pertimbangan, saran, masukan, serta rekomendasi kepada para pemangku kepentingan, seperti gubernur, bupati/wali kota, Dinas Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta satuan pendidikan.

Pertimbangan tersebut diberikan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pendidikan. Selain itu, Dewan Pendidikan juga berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan publik di bidang pendidikan, baik yang berskala nasional maupun daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat. Melalui peran tersebut, Dewan Pendidikan diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, serta mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Kemendikbud telah menetapkan dasar hukum bagi pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana dimuat dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan yang dimaksud dalam Kepmendiknas tersebut adalah Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota karena berkedudukan di kabupaten/kota. Sementara sampai dengan tulisan hukum ini terbit pada tanggal 4 Oktober 2018, Kemendikbud belum menetapkan Permendikbud tentang Dewan Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan Nasional sesuai ketentuan dalam UU Sisdiknas bahwa Dewan Pendidikan dibentuk setiap tingkatan, baik nasional, provinsi sampai di tingkat kabupaten/kota sebagaimana tercantum pada Pasal 56, dan pembentukannya diatur melalui PP yang kemudian baru dikeluarkan pada tahun 2010 PP Nomor 17 Tahun 2010. (Nasional, 2003)

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU 20/2003 jo. Pasal 1 angka 42 PP 17/2010, Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Lebih lanjut, dalam Pasal 56 UU 20/2003 menyatakan bahwa: (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan

dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam peran Dewan Pendidikan Kota Batu dalam peningkatan mutu pendidikan berdasarkan kerangka teori mutu dari Philip B. Crosby. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial secara kontekstual dan holistik, khususnya dalam memahami strategi, kebijakan, serta dinamika pelaksanaan fungsi Dewan Pendidikan dalam konteks lokal. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* atau berdasarkan dengan pertimbangan tertentu, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dan relevansi peran mereka dalam kebijakan dan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan. Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari anggota Dewan Pendidikan Kota Batu, kepala sekolah, guru, serta pejabat Dinas Pendidikan. Seluruh informan dipilih berdasarkan kriteria pengalaman, posisi, dan kapasitas individu dalam memahami peran dan fungsi lembaga Dewan Pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur agar memungkinkan fleksibilitas dalam menggali data yang kaya dan mendalam dari para informan. Observasi dilakukan di sekolah-sekolah yang mendapatkan pendampingan atau intervensi dari Dewan Pendidikan, untuk mengamati implementasi program mutu pendidikan secara langsung. Selain itu, data pendukung dikumpulkan melalui dokumen resmi seperti laporan program, notulen rapat, kebijakan daerah, serta publikasi internal Dewan Pendidikan.

Data dianalisis menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan dan konsistensi informasi dari berbagai sumber. Triangulasi yang digunakan mencakup triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan valid. Hasil analisis disajikan secara deskriptif naratif untuk menggambarkan secara menyeluruh kontribusi Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip mutu dari Crosby seperti kesesuaian dengan kebutuhan, *zero defect*, dan pencegahan kesalahan tercermin dalam kebijakan dan praktik di lapangan. (Sayyid et al., 2023)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Pendidikan di Kota Batu masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun non-struktural yang berdampak pada mutu dan pemerataan layanan pendidikan. Salah satu permasalahan utama adalah kesenjangan akses pendidikan, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti daerah pegunungan dan pedesaan. Meskipun Kota Batu dikenal sebagai kota wisata dengan perkembangan infrastruktur yang cukup pesat, distribusi sekolah yang tidak merata menyebabkan

sebagian siswa harus menempuh jarak jauh untuk bisa bersekolah, terutama di jenjang SMP dan SMA. Kondisi geografis yang berbukit serta keterbatasan transportasi umum menjadi kendala tambahan yang menyebabkan kehadiran dan partisipasi sekolah tidak optimal. Hal ini turut berkontribusi terhadap angka putus sekolah yang, meskipun tidak tinggi secara statistik, tetap menjadi persoalan yang patut diperhatikan. (of Batu Municipality, 2022)

Selain itu, permasalahan yang terdapat di kota batu adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, terutama guru dan tenaga kependidikan. Masih terdapat ketimpangan dalam hal kompetensi dan distribusi guru antar sekolah. Sekolah-sekolah di wilayah pusat kota umumnya memiliki tenaga pengajar yang lebih lengkap dan berkualifikasi, sedangkan di wilayah pinggiran atau desa, banyak guru berstatus honorer yang belum memperoleh pelatihan berkelanjutan atau peningkatan kompetensi secara rutin. Kesejahteraan guru honorer yang rendah juga menjadi masalah tersendiri, yang berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja mereka dalam mendidik siswa. Di sisi lain, penguasaan teknologi dan metode pembelajaran modern oleh guru belum merata, sehingga pembelajaran masih cenderung konvensional dan kurang menarik bagi siswa. (Nugroho, 2022)

Fasilitas pendidikan yang belum memadai juga menjadi tantangan yang signifikan. Beberapa sekolah di Kota Batu masih kekurangan sarana dan prasarana penunjang, seperti ruang kelas yang layak, laboratorium sains, ruang komputer, perpustakaan, hingga koneksi internet yang stabil. Padahal, di era digital dan pasca-pandemi, teknologi menjadi unsur penting dalam mendukung proses pembelajaran yang fleksibel dan efektif. Kurangnya fasilitas ini bukan hanya berdampak pada kualitas pembelajaran, tetapi juga pada kesiapan siswa menghadapi tantangan global dan persaingan kerja. Pemerintah daerah memang telah melakukan berbagai upaya perbaikan infrastruktur, namun anggaran pendidikan yang terbatas serta kebutuhan pembangunan yang luas membuat pelaksanaannya belum merata di seluruh wilayah. (Menciptakan & Berkualitas, 2024)

Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya keterkaitan antara sistem pendidikan dan potensi lokal Kota Batu, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan UMKM. Kurikulum yang diterapkan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menekankan pada pengembangan keterampilan praktis serta kewirausahaan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Pendidikan vokasi, yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam menyiapkan lulusan siap kerja, belum dikembangkan secara optimal. Hal ini menyebabkan banyak lulusan SMA/SMK yang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri atau bahkan dunia usaha lokal. Untuk itu, diperlukan perencanaan pendidikan yang berbasis potensi daerah, peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta, dan pembaruan kurikulum yang lebih aplikatif agar pendidikan di Kota Batu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi. (Berkelanjutan & Raya, 2025)

Sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di Kota Batu, pembentukan Dewan Pendidikan Daerah dapat menjadi solusi strategis yang efektif. Dewan ini berfungsi sebagai wadah koordinasi, pengawasan, dan pemberi masukan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam merancang serta mengimplementasikan

program pendidikan yang tepat sasaran. Melalui keterlibatan berbagai unsur seperti akademisi, praktisi pendidikan, tokoh masyarakat, dan perwakilan orang tua, Dewan Pendidikan dapat menjembatani komunikasi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Keberadaan dewan ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, mengawal pemerataan fasilitas pendidikan, serta mengarahkan kurikulum agar lebih relevan dengan potensi lokal Batu seperti pariwisata dan pertanian. Dengan demikian, Dewan Pendidikan dapat menjadi motor penggerak transformasi pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Kota Batu. (PANDUAN UMUM DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH, n.d.)

3.1.1 Pembahasan

Pendidikan di Kota Batu dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Meskipun dikenal sebagai kota wisata yang berkembang pesat, tidak semua wilayah di Kota Batu merasakan pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang setara. Terdapat kesenjangan mutu antar sekolah di kota batu, baik dari sisi fasilitas, kompetensi guru, hingga capaian hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan adanya aduan masyarakat terkait lokasi lembaga pendidikan negeri yang berada di tengah kota dan minimnya sekolah berkualitas di desa-desa terpencil ha tersebut disampaikan oleh salah satu anggota dari dewan pendidikan itu sendiri pada saat audiensi. Selain itu, kurangnya inovasi pembelajaran, minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan pendidikan, dan belum optimalnya sistem pengawasan mutu menjadi beberapa penyebab utama lemahnya performa sejumlah institusi pendidikan di kota Batu. Kondisi ini mendorong perlunya kehadiran lembaga independen yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan penyelenggara pendidikan secara objektif dan profesional. Maka dibentuklah Dewan Pendidikan Kota Batu, yang berfungsi sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan secara sistemik dan berkelanjutan.

Dewan Pendidikan Kota Batu sendiri dibentuk pada tahun 2021. Yang kemudia disusul dengan kegiatan pengukuhan pengurus Dewan Pendidikan periode 2021–2026 yang dilakukan pada tanggal 30 September 2021 oleh Wali Kota Batu, Hj. Dewanti Rumpoko, bertempat di pendopo rumah dinas Wali Kota Batu. Dalam periode ini, Dr. Atok Miftahul Huda dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pendidikan, dengan Dr. Fadillah Amin sebagai Wakil Ketua I dan Dra. Hj. Mistin sebagai Wakil Ketua II, bersama sembilan pengurus lainnya yang berasal dari unsur masyarakat dan Pemerintah Kota Batu. (Wali Kota Batu Kukuhkan Dewan Pendidikan Periode 2021-2026, n.d.)

Dalam menjalankan perannya, Dewan Pendidikan Kota Batu mengadopsi pendekatan manajemen mutu pendidikan yang sejalan dengan pemikiran Philip B. Crosby, seorang tokoh yang menekankan bahwa mutu adalah “kesesuaian dengan persyaratan atau standar.” Konsep ini menjadi dasar penting bagi upaya Dewan Pendidikan dalam merumuskan ulang parameter kualitas pendidikan di Kota Batu, yang tidak hanya dilihat dari angka kelulusan semata, tetapi juga dari relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, kesiapan lulusan menghadapi tantangan global, serta kepuasan pengguna layanan pendidikan. Dewan Pendidikan memahami

bahwa kualitas harus didefinisikan sesuai dengan kebutuhan nyata, seperti tuntutan kompetensi abad ke-21, nilai-nilai karakter, serta penguasaan teknologi digital yang kini menjadi syarat penting dalam dunia kerja.

Selain itu, Dewan Pendidikan berupaya membangun sistem pencapaian kualitas yang berorientasi pada pencegahan kesalahan, bukan hanya memperbaiki kegagalan. Melalui pelatihan rutin untuk guru, pengembangan kurikulum yang kontekstual, serta program pendampingan untuk sekolah-sekolah yang tertinggal, Dewan Pendidikan mendorong sekolah-sekolah agar mampu memenuhi standar mutu sejak awal proses pembelajaran. Ini sejalan dengan prinsip Crosby yang menekankan pentingnya sistem yang mampu menghindari cacat, bukan hanya menangani akibat dari mutu yang buruk. Dalam jangka panjang, pendekatan ini terbukti lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Prinsip “zero defect” atau tanpa kesalahan juga menjadi arah kerja Dewan Pendidikan Kota Batu dalam menetapkan standar kinerja pendidikan di Kota Batu. Target-target seperti tidak ada siswa putus sekolah, seluruh guru tersertifikasi, serta peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar hingga menengah menjadi tolak ukur kinerja yang dikejar secara serius. Hal ini bukan tanpa alasan digagas namun sesuai dengan kondisi pendidikan kota batu yaitu sekitar 1.000 siswa tidak bersekolah.(Mutohar, 2023) Salah satu solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan evaluasi berkala dan mendorong budaya mutu di lingkungan satuan pendidikan yang juga didukung oleh Dewan Pendidikan dengan membentuk sistem yang mendorong sekolah untuk terus memperbaiki diri dan mencapai hasil terbaik. Sehingga kualitas tidak lagi dipandang sebagai hasil akhir, tetapi sebagai proses berkelanjutan yang melekat dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan.

Dewan Pendidikan Kota Batu menerapkan pendekatan pengukuran kualitas dengan menghitung biaya kualitas (cost of quality), sebagaimana yang ditekankan oleh Crosby. Hal ini mencakup pemahaman tentang konsekuensi dari mutu pendidikan yang buruk, seperti biaya remedial siswa, pelatihan ulang bagi guru yang tidak kompeten, serta dampak sosial dari lulusan yang tidak siap kerja. Dengan demikian, pendekatan ini mengubah pola pikir pengelola pendidikan bahwa investasi terhadap mutu sejak awal akan lebih murah dibanding menanggung biaya akibat kegagalan mutu. Kesadaran ini perlahan mulai membentuk budaya baru di kalangan sekolah dan pemerintah daerah, yaitu budaya mutu yang proaktif dan terukur.

4. KESIMPULAN

Permasalahan pendidikan di Kota Batu mencerminkan tantangan yang umum dihadapi oleh banyak daerah, seperti belum meratanya kualitas antar sekolah, kurangnya inovasi pembelajaran, serta rendahnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Ketidaksesuaian antara hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu yang diharapkan. Dalam konteks ini, mutu pendidikan menurut pendekatan Philip B. Crosby menjadi sangat relevan, di mana kualitas didefinisikan sebagai kesesuaian terhadap kebutuhan dan standar yang telah ditentukan.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Batu, Pemerintah Kota Batu membentuk Dewan Pendidikan pada tahun 2021 sebagai salah satu upaya memperkuat tata kelola pendidikan daerah. Kehadiran Dewan Pendidikan memberikan dimensi baru dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan melalui fungsi pemberian pertimbangan, dukungan, pengawasan, serta mediasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Pendidikan tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memberikan masukan terhadap kebijakan pendidikan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Peran tersebut dapat dianalisis menggunakan perspektif manajemen mutu yang dikemukakan oleh Philip B. Crosby, yang menegaskan bahwa kualitas dapat diraih melalui upaya pencegahan kesalahan (*prevention*), pemenuhan standar kerja tanpa kesalahan/cacat (*zero defect*), serta pengukuran kualitas berdasarkan biaya ketidaksesuaian (*price of nonconformance*). Pendekatan tersebut relevan untuk mengkaji bagaimana Dewan Pendidikan Kota Batu menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai program, rekomendasi kebijakan, serta mekanisme pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Pendidikan Kota Batu menjadi menarik untuk diteliti guna memperoleh gambaran mengenai implementasi manajemen mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekaligus mengetahui kontribusinya terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Batu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam kontribusi Dewan Pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode guna mendapatkan gambaran yang valid dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pendidikan mampu menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan pelaksana pendidikan di lapangan, serta berperan penting dalam mendorong budaya mutu di lingkungan sekolah. Dengan demikian, keberadaan Dewan Pendidikan di Kota Batu bukan hanya sebagai pelengkap sistem, tetapi menjadi aktor utama dalam transformasi pendidikan daerah menuju mutu yang lebih tinggi, relevan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berkelanjutan, M. P., & Raya, D. I. M. (2025). *Membangun pendidikan berkelanjutan di malang raya*. 3(5).
- Menciptakan, U., & Berkualitas, P. (2024). *MENINGKATKAN MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR UNTUK MENCIPTAKAN PEMBELAJARAN BERKUALITAS*. 1206, 461–468.
- Mutohar, P. M. (2023). *Kapita Selekta dan Manajemen Kepemimpinan Pendidikan*.
- Nasional, S. P. (2003). *Pembentukan dewan pendidikan nasional sesuai amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. 1–10.
- Nugroho, A. S. (2022). *Peningkatan Kualitas Guru , Sebanding dengan Peningkatan Pendidikan ?* 6(5), 7758–7767.
- of Batu Municipality, B. P. S. K. B. B.-S. (2022). *Kota Batu Dalam Angka 2022*. 11, 402–488. <https://batukota.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/2c4f52da647b109af8ad4fff/kota-batu-dalam-angka-2022.html>
- PANDUAN UMUM DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH*. (n.d.).
- Sayyid, U. I. N., Rahmatullah, A., Sayyid, U. I. N., Rahmatullah, A., Sayyid, U. I. N., Rahmatullah, A., Sayyid, U. I. N., & Rahmatullah, A. (2023). *PRINSIP-PRINSIP CROSBY : PENERAPAN UNTUK KEUNGGULAN PENDIDIKAN* Lutfi Firdausi. 19, 74–85.
- Wali Kota Batu Kukuhkan Dewan Pendidikan Periode 2021-2026. (n.d.). https://batukota.go.id/Portal/detail_b/4102
- Alifian, M. A. (2024, October 30). Kesenjangan Pendidikan di Kota Batu: Tantangan dan Solusi Peningkatan Kualitas. <https://beritajatim.com/kesenjangan-pendidikan-di-kota-batu-tantangan-dan-solusi-peningkatan-kualitas>
- cityguide. (2024, October 14). 1.000 Anak di Kota Batu Tidak Sekolah, Kenapa? City Guide 911 FM. <https://cityguide911fm.com/1-000-anak-di-kota-batu-tidak-sekolah-kenapa/>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). Pedoman umum pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. - Penelusuran Google. (n.d.). Retrieved April 30, 2025
- Batu, B. P. S. K. (n.d.). Kota Batu Dalam Angka 2022. Retrieved April 30, 2025, from <https://batukota.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/2c4f52da647b109af8ad4fff/kota-batu-dalam-angka-2022.html>
- Salinan Kepmendikbudristek tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Tahun 2023—2024. (2024, January 23). Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah. <https://kaltim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Tulisan-Hukum-Pembentukan-Dewan-Pendidikan-Nasional.pdf>
- Syamsuri (CR), H. (n.d.). Wali Kota Batu Kukuhkan Dewan Pendidikan Periode 2021-2026—TIMES Indonesia. Retrieved May 10, 2025, from <https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/373490/wali-kota-batu-kukuhkan-dewan-pendidikan-periode-20212026>
- Sukirman, H., Suyono, & Santosa, A. B. (2023). Manajemen pendidikan mutu terpadu. Nuta Media.
- Asha, L. (2019). Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Rejang Lebong. Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 3(1), 38-56.
- Herawati, E. S. B., Suryadi, S., Warlizasusi, J., & Aliyyah, R. R. (2020). Kinerja Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 4(1), 87-100.
- Mutohar, P. M. (2023). *Kapita Selekta dan Manajemen Kepemimpinan Pendidikan*.